

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengangguran selalu menjadi masalah yang diperhatikan oleh berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

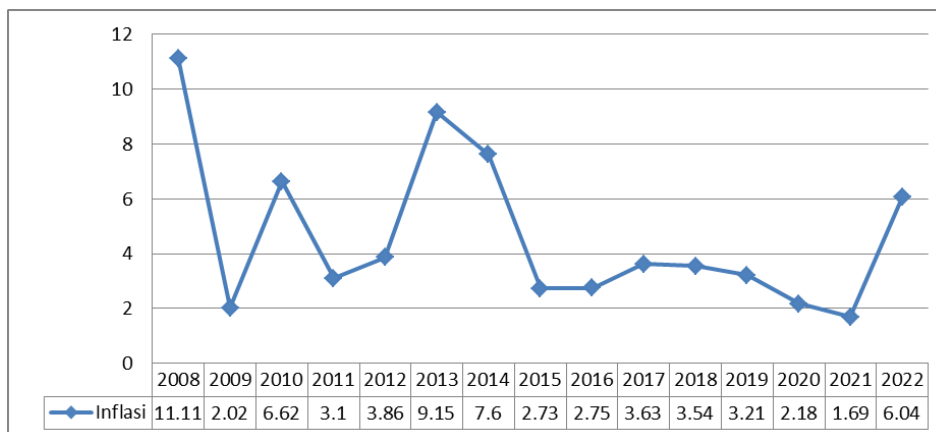
Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prestasi membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja (Sukirno, 2002:13). Pengangguran akan selalu muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi (Franita, 2016). Tingkat pengangguran hingga kini dipercaya saling berkorelasi dengan kenaikan harga secara umum (inflasi). Sedangkan kurva Phillips menjelaskan hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Ketika tingkat inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran akan rendah dan begitu sebaliknya. Hubungan antara

keduanya merupakan suatu persoalan pokok dan merupakan topik klasik dalam analisis makroekonomi.

Depresi merupakan suatu malapetaka yang terjadi dalam ekonomi di mana kegiatan produksi terhenti akibat adanya inflasi yang tinggi dan pada saat yang sama terjadi pengangguran yang tinggi pula (Amir, 2008). Sebagaimana yang diketahui pada saat depresi ekonomi melanda Amerika pada tahun 1929, terjadi inflasi yang tinggi disertai dengan pengangguran yang tinggi. Berdasarkan pada fakta itulah ahli ekonomi A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi perekonomian Inggris untuk periode 1861-1957.

Dari hasil pengamatan tersebut terdapat hubungan negatif antara kedua variabel tersebut dengan korelasi yang cukup kuat. Jika inflasi tinggi, maka pengangguran akan rendah, demikian pula sebaliknya. Hasil pengamatan ini disebut Kurva Phillips. *Trade-off* antara inflasi dan pengangguran merupakan prinsip dasar ekonomi (Mankiw, 2003). Jika berdasar pada pernyataan tersebut, penciptaan kesempatan kerja dan kestabilan harga tidak dapat terjadi bersamaan. Jika pemerintah menghendaki kestabilan harga, maka harus mau menanggung beban tingkat pengangguran yang tinggi. Demikian pula sebaliknya, jika pemerintah mau menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, maka konsekuensinya angka inflasi akan cenderung lebih tinggi. Kedua pilihan tersebut tentu saja sama-sama sulit untuk dilakukan. Padahal tingkat inflasi rendah bersama-sama dengan tingkat pengangguran yang juga rendah, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua negara dan menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi (Noor, 2011).

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu (Nopirin, 1997). Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga-harga barang umum mengalami kenaikan secara terus menerus (kontinu) yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti besarnya permintaan barang (berlebihnya likuiditas/uang sebagai alat tukar), sementara itu produksi dan distribusi barang kurang. Dalam perekonomian inflasi yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya ketidakstabilan, menurunkan gairah menabung dan berinvestasi, menghambat usaha peningkatan ekspor, sehingga menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial (Permady & Sugianto, 2020). Inflasi merupakan salah satu fundamental penting dalam masalah ekonomi yang bersifat kompleks. Inflasi memiliki hubungan dengan banyak masalah ekonomi yang lain. Inflasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masalah-masalah ekonomi lain tersebut. Salah satu masalah ekonomi yang berhubungan dengan inflasi adalah pengangguran. Tingkat Inflasi di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Berikut Gambar 1.1 yang menunjukkan data tingkat inflasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2022.



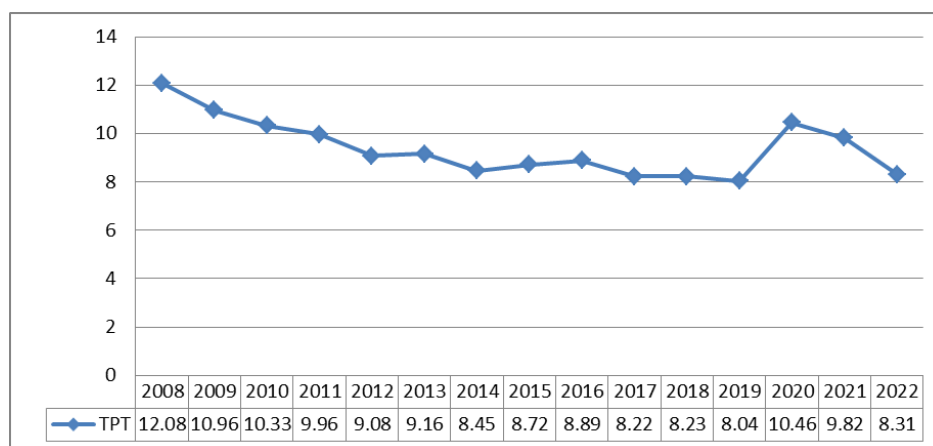
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1.1 Tingkat Inflasi di Provinsi Jawa Barat 2008-2022

Dari gambar tingkat inflasi di atas menunjukkan bahwa tingkat inflasi pada tahun 2012 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 merupakan tahun dimana tingkat inflasi tertinggi dengan tingkat inflasi sebesar 9.15 persen dikarenakan kenaikan BBM di Indonesia. Angka inflasi Jawa Barat sepanjang tahun 2018 tercatat mencapai 3,54 persen. Sedangkan pada tahun 2015, 2016, 2017 tetap stabil dimana tingkat inflasi dibawah 4 persen. Angka inflasi tahunan Provinsi Jawa Barat sepanjang 2021 tercatat sangat rendah, hanya 1.69 persen. Angka tersebut jauh dari target tahunan Jawa Barat sekitar 3 persen juga terendah sejak dua tahun terakhir. Pada tahun 2020 inflasi Jawa Barat mencapai 2.18 dan tahun 2022 mencapai 6.04 persen.

Kesempatan kerja biasanya tercipta sebagai dampak banyaknya kegiatan usaha yang berjalan, baik usaha yang dilakukan oleh pihak swasta, maupun usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin rendah kesempatan kerja di suatu negara, maka semakin besar pula jumlah angkatan kerja yang tidak dapat bekerja. Hal ini menyebabkan pengangguran besar-besaran di sebuah negara. Berikut ini

merupakan gambar Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022:



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022

Pada Gambar 1.2 menjelaskan tentang bagaimana gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2022. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan angkatan kerja otomatis juga akan ikut meningkat, sedangkan pada aspek penyerapan tenaga kerja dari tahun ke tahun juga ikut meningkat dikarenakan lapangan pekerjaan juga semakin luas. Tercatat pada tahun 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (TPT) Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat pada bulan Agustus 2013 mengalami peningkatan sekitar 0,08 persen dibandingkan Agustus 2012, yaitu dari 9,08 persen menjadi 9,16 persen. Pada bulan Agustus 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat kembali mengalami penurunan sebesar 0.71 persen dibandingkan bulan Agustus tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen dari 8,45 persen pada Agustus 2014, menjadi 8,72 persen pada Agustus 2015.

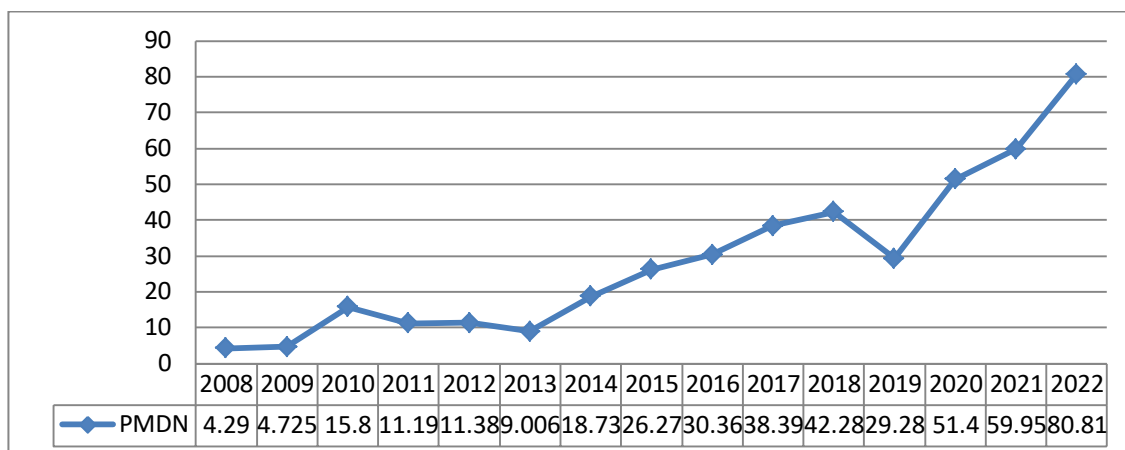
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2017 sebesar 8,22 persen turun menjadi 8,17 persen pada Agustus 2018. Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat tercatat pada tahun 2020 yaitu 10,46 persen hal ini disebabkan oleh dampak dari adanya Covid. Angka ini menjadi persentase tertinggi dalam 10 tahun terakhir

Dari data diatas dapat dilihat pengangguran mengalami naik dan turun di 10 tahun terakhir di Provinsi Jawa Barat. Sehingga untuk menghindari agar pengangguran tidak terus mengalami peningkatan peran pemerintah sangat aktif untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga dapat mengatasi masalah pembangunan ekonomi. Investasi disuatu negara dapat bersumber dari penanaman modal asing. Kedua investasi tersebut memiliki tujuan yang sama-sama meningkatkan perekonomian bangsa sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran.

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu: investasi *Finacial assets* dan investasi pada *real assets*. Investasi pada *financial assets* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat, deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran,

opsi dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real assets* diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, penderian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya.

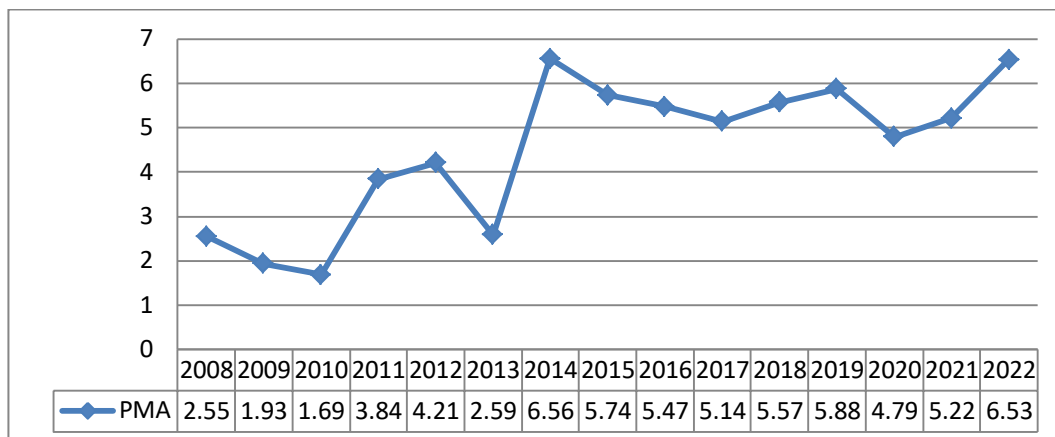
Di Provinsi Jawa Barat mempunyai daya tarik penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing karena di Provinsi Jawa Barat memiliki letak geografis dan demografis yang strategis dan juga didukung oleh kegiatan-kegiatan yang memiliki pasar cukup menjanjikan. Sehingga menciptakan iklim dan lingkungan penanaman modal yang kondusif dari waktu ke waktu. Langkah inovasi yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan kemitraan strategis diantara sesama pelaku usaha dengan pemerintahan. Sehingga secara signifikan mampu menumbuhkan minat berinvestasi para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat, diberbagai bidang usaha. Hal ini tidak terlepas dari persepsi yang sama dari stakeholders tentang perlunya menarik investasi yang besar untuk menggerakkan roda perekonomian dalam jumlah yang lebih besar di Provinsi Jawa Barat, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, sekaligus mampu memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat dan menaikkan pendapatan asli daerah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

**Gambar 1.3 Realisasi Investasi PMDN Di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008-2022 (Triliun Rupiah)**

Pada Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 Realisasi Penanaman Modal dalam Negeri Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari Rp11,384 menjadi Rp9,006 Triliun hal ini disebabkan penundaan - penundaan yang dilakukan investor sehubungan dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar minyak yang dilakukan Pemerintah. Pada tahun-tahun berikutnya realisasi PMDN di Provinsi Jawa Barat terus meningkat. Disamping menggali sumber penanaman modal dalam negeri dan pembiayaan asli daerah, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri salah satunya adalah Penanaman Modal Asing Langsung. Walaupun pada tahun 2019 turun sebesar Rp 13 Triliun yang diakibatkan oleh pandemic Covid 19, namun tahun selanjutnya PMDN naik kembali seiring dengan pemulihan ekonomi pasca Pandemi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1.4 Realisasi Penanaman Modal Asing Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022 (Dalam Juta Dolar)

Berdasarkan grafik di atas terlihat pada tahun 2013 terjadi kenaikan nilai Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Barat sebesar US\$7124,9 juta yang mana tahun tersebut menjadi nilai paling tinggi dari 10 tahun terakhir. Sedangkan tahun-tahun berikutnya 2014 sampai 2017 cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2020 kembali turun dikarenakan dampak dari covid. Namun dari tahun 2020 sampai 2022 PMA kembali naik seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Permasalahan pengangguran terbuka memang sangat kompleks untuk dibahas, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator ekonomi yang mempunyai hubungan dengan tingkat pengangguran. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang diduga mempunyai hubungan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dan uraian tersebut penyusun tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman**

Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Inflasi, PMDN, dan PMA secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2022?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi, PMDN, dan PMA secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, PMDN, dan PMA secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, PMDN, dan PMA secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Sebagai pertimbangan dalam setiap perumusan kebijakan yang akan disusun dan di implementasikan guna mencapai tujuan perekonomian yang seimbang.

2. Meningkatkan pengembangan dan pengetahuan khususnya mengenai inflasi, penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA) dan pengangguran.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Meningkatkan kemampuan penelitian dan penulisan karya ilmiah, sehingga dapat bermanfaat dalam mengembangkan diri serta untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi
2. Sebagai masukan bagi kalangan akademis dan penelitian yang tertarik membahas masalah ini.

1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Peneliti mendapatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) serta dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang didapatkan dari internet dan perpustakaan.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada awal semester ganjil yaitu pada bulan September 2022, dan diperkirakan selesai pada bulan Desember 2023. Penelitian ini dimulai dari pengajuan judul sampai sidang skripsi.

